

**STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PELAYANAN ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN ATR/BPN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**SALOMO**  
**NIT. 20293472**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

## **ABSTRACT**

SPBE is an implementation carried out by the government in order to apply information and communication technology with the aim of obtaining services to SPBE users. In SPBE there are 4 domains that need to be considered to increase the value of SPBE, namely SPBE policy, SPBE governance, strategic planning, SPBE management, and SPBE services. This research aims to determine the strategy for increasing the SPBE index value in the ATR/BPN ministry in 2023. The research method used a qualitative descriptive approach with an interview method using SWOT to analyze the result. The results of this research show strategies such as maximizing human resources, strengthening and completing regulations, increasing budget funds, maximizing data security, providing infrastructure, carrying out routine and periodic coordination, creating archive banks, synergizing between internal and external teams, and optimizing independent evaluation. From this strategy, the Ministry of ATR/BPN can consider Strengths, Weaknesses, Threats and Opportunities in determining future SPBE strategy steps.

**Keywords:** SPBE, Ministry of Agraria / National Land Agency, SWOT

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. <i>E-Government</i> .....	13
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	14
3. Tingkat Kematangan SPBE.....	15
4. Pemantauan dan Evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023.....	20
B. Kerangka Pemikiran .....	22
C. Pertanyaan Penelitian .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Jenis dan Sumber Data .....	26

D. Analisis Data .....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	34
A. Kementerian ATR/BPN .....	34
B. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN.....	37
C. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN .....	39
D. Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN.....	41
E. Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN .....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penilaian SPBE ATR/BPN 2022 .....	44
B. Perbandingan Progres Indikator Nilai SPBE Tahun 2022 dan SPBE 2023 .	47
C. Evaluasi Hasil Penilaian SPBE ATR/BPN 2022 dengan Analisa SWOT ....	48
D. Membentuk Tim Asesor Yang Memiliki Tupoksi dan Tanggung Jawab Kerja Terhadap Indikator Penilaian SPBE.....	61
E. Sinergi Pembentukan SPBE antara Kementerian ATR/BPN dan Instansi lain .....	69
F. Dampak Peningkatan Nilai SPBE Di Kementerian ATR/BPN .....	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	152

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh layanan kepada pengguna SPBE (Kementerian ATR/BPN, 2020). Dalam penerapannya SPBE diperlukan untuk memastikan pelaksanaan di pusat dan daerah berjalan selaras sesuai dengan prinsipnya yaitu efektif, efisien dan berkesinambungan. SPBE dinilai berdasarkan tingkat kematangan SPBE yang berupa kerangka kerja yang bertujuan untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas fungsi teknis dari SPBE. Tingkat kematangan SPBE dibagi menjadi dua yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan pada fungsi teknis.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses meliputi rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi, dan optimum sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis meliputi informasi interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi. Dasar hukum dilakukannya SPBE yaitu tertuang pada 3 dasar peraturan yang meliputi:

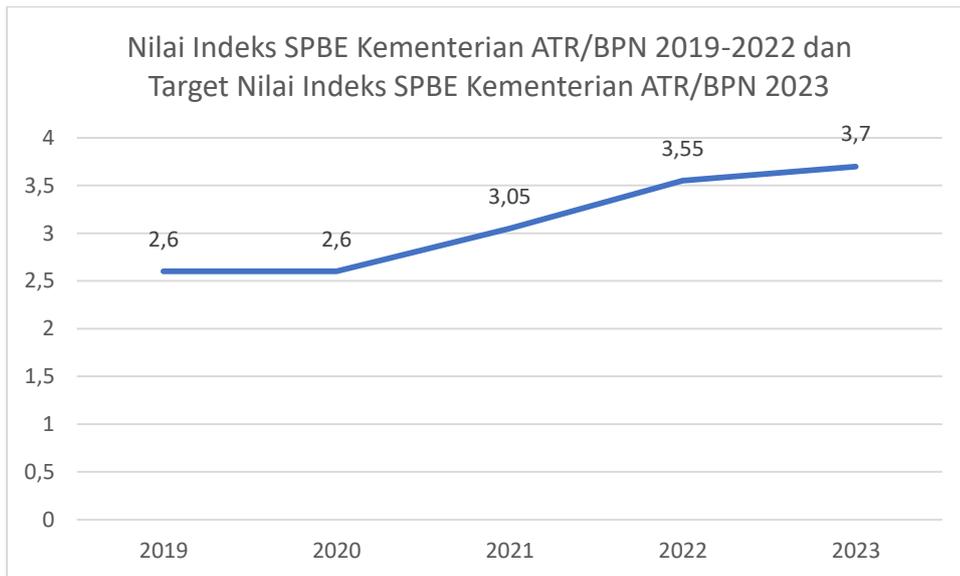
- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 mengenai Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerapan SPBE di Indonesia terjadi karena adanya beberapa permasalahan yaitu pengeluaran pembelanjaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sistem yang dibangun antar daerah dan pusat masih bersifat

masing – masing sehingga terjadi disintegrasi sistem informasi pada sektor pemerintahan pusat ke daerah. Berdasarkan hal tersebut sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ditargetkan oleh pemerintah secara menyeluruh pada tahun 2023 dalam rangka untuk mewujudkan transformasi digital di seluruh sektor di Indonesia (Annur, 2020).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria atau pertanahan di pemerintahan dalam rangka membantu presiden dalam pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah mengimplementasikan SPBE sejak tahun 2019, dengan nilai indeks 2,60 / 4,00 dengan perolehan predikat “Baik”. Transformasi digital terkait kebijakan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan SPBE yang berkualitas terus ditunjukkan melalui peningkatan indeks SPBE dari tahun 2020 hingga 2022 (Sisilianingsih et al., 2023).

Pada tahun 2020 indeks SPBE masih sama seperti tahun 2019 yaitu 2,6. Hal ini diakibatkan karena kebijakan internal anggaran TIK, sistem aplikasi, kebijakan internal rencana induk SPBE serta kebijakan internal inovasi proses bisnis masih rendah, sehingga Kementerian ATR/BPN masih perlu bertransisi untuk menghadapi kekurangan – kekurangan tersebut. Indeks SPBE tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,05 karena mampu meminimalisir indikator yang mengalami kekurangan di tahun 2020. Indeks SPBE tahun 2022 semakin meningkat menjadi sebesar 3,55 hal ini karena Kementerian ATR/BPN terus berintegrasi meningkatkan indeks SPBE secara berkelanjutan. Pada tahun 2023 Kementerian ATR/BPN menargetkan nilai indeks SPBE menjadi 3,7 dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Antara Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dengan harapan terjadinya peningkatan grafik menjadi seperti berikut.



Gambar 1. 1 Nilai Indeks SPBE Kementerian ATR/BPN 2019-2022 dan Target Nilai Indeks SPBE Kementerian ATR/BPN 2023

Sumber: Dokumen Pusdatin Kementerian ATR/BPN (2023)

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh di seluruh sektor. Adapun kiat – kiat yang dilakukan untuk meningkatkan indeks SPBE menjadi 3,7 perlu dilakukan peningkatan transformasi digital yang dapat dilihat pada peta alur berikut.



Gambar 1. 2 Peta Alur Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN

Sumber: Dokumen Pusdatin Kementerian ATR/BPN (2023)

Berdasarkan peta alur, dapat dilihat bahwa Kementerian ATR/BPN menerapkan 4 sasaran dalam rangka pemenuhan peningkatan transformasi digital dengan pengimplementasian konsep “*Less Paper*” dengan agenda implementasi buku tanah elektronik, penyimpanan data menggunakan block data, redefinisi bisnis proses digital dan redesain sertifikat. Melalui keempat strategi tersebut, Kementerian ATR/BPN harus mampu memenuhi kebutuhan domain serta aspek penilaian untuk mewujudkan peningkatan indeks SPBE menjadi 3,7, adapun domain dan aspek penilaian yang harus dipenuhi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Domain dan Aspek Penilaian

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 – Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Sumber: Kementerian ATR/BPN 2020

Penilaian predikat indeks SPBE secara kumulatif dinilai dengan rentang indeks dan predikat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Kementerian ATR/BPN 2020

Berdasarkan domain penilaian indeks SPBE pada Kementerian ATR/BPN dan terjadinya peningkatan yang berkelanjutan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “Strategi Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Upaya Mewujudkan Transformasi Digital dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Elektronik di Kementerian ATR/BPN”.

## **B.Rumusan Masalah**

Transformasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah secara menyeluruh di tahun 2023, sudah mulai diimplementasikan oleh Kementerian ATR/BPN sejak 2019. Peningkatan kualitas sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terus dikembangkan dari tahun ke tahun agar dapat menghubungkan pemerintah pusat dan daerah dan mendegradasi adanya disintegrasi antara kedua belah pihak. SPBE yang baik dapat membantu pemerintah dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap pegawai. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN perlu mengimplementasikan strategi peningkatan nilai SPBE menjadi 3,7 sesuai dengan target “Dokumen Perjanjian Kinerja Antara Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023?
3. Bagaimana cara menanggulangi faktor penghambat dalam mewujudkan peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023?
4. Bagaimana progres peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023?
5. Apa dampak penerapan SPBE yang lebih baik terhadap pelayanan elektronik di Kementerian ATR/BPN?

### **C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan beberapa kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini diterangkan sebagai berikut.

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui strategi peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023.
- b) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023.
- c) Mengetahui cara menanggulangi faktor penghambat dalam mewujudkan peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023.
- d) Mengetahui progres peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023.
- e) Bagaimana dampak penerapan SPBE yang lebih baik terhadap pelayanan elektronik di Kementerian ATR/BPN

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan akademis yaitu dapat memberikan wawasan, pengetahuan serta informasi tambahan terkait strategi peningkatan nilai indeks SPBE pada Kementerian ATR/BPN di era transformasi digital.
- b) Kegunaan sosial dapat dijadikan sebagai deskripsi realita di lapangan mengenai implementasi penerapan penilaian nilai indeks SPBE sehingga meningkatkan kesadaran teknologi bagi masyarakat di era digital.
- c) Kegunaan praktis yaitu sebagai bahan kritik serta saran pada Kementerian ATR/BPN terkait strategi kenaikan nilai indeks SPBE untuk organisasi yang lebih terintegrasi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat maupun Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian terkait SPBE dan transformasi digital sudah banyak dilakukan sebelumnya, adapun penelitian yang dilakukan oleh Adinugroho (2023) menjelaskan mengenai mewujudkan penyelenggaraan layanan sektor publik di bidang Pertahanan Kementerian Agrari dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional terkait transformasi digital dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana perubahan hak tanggungan yang mulanya pendaftaran konvensional hingga bertransformasi menjadi elektronik. Hal lain yang dibahas yaitu mengenai perubahan layanan publik pertahanan dengan dimensi kualitas layanan melalui pendekatan E-S Qual dan E-Recs Qual.

Transformasi digital juga diulas dalam penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian Tulungan *et al* (2022) yang menjelaskan mengenai peran kepemimpinan dalam transformasi digital pada sektor pemerintahan dengan metode penelitian yaitu kualitatif dan hasil yang diperoleh yaitu bahwa peranan kepemimpinan digital berpengaruh dalam mewujudkan transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi dan proses kerja maka akan tercipta transformasi digital yang berkualitas di sektor pemerintahan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendriyadi dan Yanti (2022) menjelaskan mengenai transformasi pelayanan publik digital di era COVID 19 dalam rangka mewujudkan *E-Government* di lingkup Pemerintah Daerah Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan mewawancarai dan mengobservasi pemerintah setempat. Hasil penelitian ini ditunjukkan dengan dalam rangka mewujudkan sistem *e-government* maka pemerintah jambi bersinergi dengan perangkat daerah (OPD) sehingga transformasi dapat terwujud dan menjalin kepercayaan masyarakat melalui transparansi pemerintah, aksesibilitas, komunikasi serta kualitas layanan pada masyarakat.

Transformasi digital juga mempengaruhi sektor ekonomi, melalui transformasi digital produk – produk inovatif dari layanan suatu bisnis dapat meningkat drastis dan menjadi peluang kompetitif bagi suatu perusahaan untuk bersaing dengan pesaingnya, hal ini merupakan isi dari penelitian Rochmawati *et al* (2023). Pada sektor badan usaha milik negara transformasi digital diteliti oleh Royyana (2023) pada PT.Kimia Farma dengan mengungkap metode deskriptif kualitatif, diperoleh hasil bahwa strategi bisnis, manajemen SI/TI serta kerangka kerja yang konseptual mendukung PT.Kimia Farma dalam mencapai tujuannya, adapun Royyana mengusulkan model bisnis digital, operasional digital, *customer experience* dan pengelolaan transformasi digital semakin ditingkatkan lagi di perusahaan tersebut agar tercapai transformasi yang optimal. Hal serupa disampaikan oleh Yanuar (2023) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bagaimana meningkatkan kemampuan SDM perusahaan dalam transformasi digital hal ini terfokus pada era digital artikel ini memberikan pengetahuan mengenai pengambilan keputusan akurat serta efektif di SDM Perusahaan.

Cahyarini (2021) menjelaskan terkait transformasi digital dari segi pelayanan publik melalui analisis SWOT dijelaskan bahwa implementasi kepemimpinan digital mendorong pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal hingga mendapatkan perbaikan pelayanan pada aspek publik digital yang terlihat melalui pencapaian perusahaan. Pelayanan publik yang sudah cukup baik ini perlu ditingkatkan lagi ke tahap optimal melalui pengembangan kompetensi digital petugas pelayanan sesuai dengan kompetensi jabatan terencana serta terukur.

Pada penjelasan yang dilakukan oleh Nurdiyah melalui teknik penelitian deskriptif kualitatif dijelaskan bahwa transformasi digital adalah pemanfaatan digital dideskripsikan melalui sebuah platform digital serta *e-commerce* yang sudah ada pada peluang pelaku agribisnis merupakan cara termudah terefektif dalam mengadopsi teknologi dengan efektif (Nurdiyah, 2023).

Transformasi digital juga diulas oleh Usman yang menjelaskan bahwa dengan adanya transformasi digital maka dapat meningkatkan kinerja pegawai

yang menjelaskan bahwa suatu instansi dalam pengembangan kompetensi digital pegawai di Bidang Pendidikan Islam Jawa Barat perlu memperbaiki sistem manajemen perencanaan dalam menyusun pengembangan kompetensi, kerjasama mitra, pelatihan digital bagi pegawai untuk meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai agar semakin mahir dalam berdigitalisasi. Transformasi juga dilakukan oleh perpustakaan bank Indonesia dalam rangka menyesuaikan pegawainya menjadi Librarian 4.0 yang menunjukkan bahwa konsep transformatif librarian diusahakan agar librarian menjadi proaktif, mampu untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuan menyesuaikan transformasi digital dan menyesuaikan pengunjung agar lebih efektif dengan bantuan digitalisasi di perpustakaan bank Indonesia.

Transformasi digital juga dapat melawan disrupsi, hal ini disampaikan oleh Sisilianingsih *et al* (2023) dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengembangan dan perancangan suatu transformasi digital dalam pembuatan aplikasi pemesanan taksi dan strateginya dalam bermitra dengan usaha lain yang telah memiliki platform memiliki hasil yang baik, begitu pula program terbaru dalam mengoptimalkan pendapatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan di era *disruption* yang semakin baik menunjukkan transformasi digital mampu melawan era disrupsi.

Dari perspektif yang berbeda, transformasi digital juga berdampak bagi masyarakat dimana pemerintah menjadi peran aktif dalam menciptakan *smart society*. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa hasil pembelajaran daring dan kombinasi dapat menciptakan mahasiswa yang paham transformasi digital dengan tingkat keingintahuan sebesar 35% dan sisanya merasa bosan apabila secara terus menerus kuliah secara *online*, dari hasil penelitian Yuniarti (2022) tersebut maka diwujudkan pembelajaran campuran agar menciptakan peradaban baru yang memahami digitalisasi dan menjadi *smart society*. Hal serupa juga disampaikan oleh Hamid (2022) yang menjelaskan bahwa transformasi manajemen fasilitas pendidikan pada suatu pendidikan dapat dimulai dari layanan pendidikan berbasis

teknologi dengan penunangan fasilitas, edukasi informasi kepada siswa untuk mewujudkan peningkatan sistem informasi di lingkup pendidikan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Atmaja mengenai transformasi digital dilakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk ekspansi praktik MSDM. Hasil penelitian menunjukkan manajemen sumber daya manusia menjadi faktor kunci sukses kemajuan era digital setiap perusahaan maupun instansi, perlu adanya penyiapan SDM siap digital, dan mengukuhkan kapabilitasnya dalam berdigital. Hal berbeda disampaikan Panjaitan dan Lupiana (2023) terkait penerapan transformasi digital beserta hambatanya, dari hasil diperoleh masih kurangnya sumber daya, perubahan budaya dan kurangnya pengetahuan sehingga hal tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka melakukan transformasi pada seluruh staf industri agar lebih memajukan transformasi digital dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putera (2021) yang melakukan penelitian terkait peran SPBE dalam pelayanan perkara di Pengadilan Agama Mojokerto, yang mana hasil penelitian ini yaitu berupa (1) pelayanan secara elektronik seperti pendaftaran perkara melalui *e-Filling*, angsuran awal melalui e-Skum, pembayaran e-Payment, panggilan persidangan melalui e-Summon, dan persidangan daring melalui e-Litigasi, (2) pelaksanaan SPBE pada Pengadilan Agama Mojokerto sudah dapat digunakan berbagai pihak, tidak hanya terbatas untuk Advokat/Pengacara (3) pelaksanaan SPBE memiliki banyak kelebihan tapi tidak menutup masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki.

Selain penelitian terkait peran atau implementasi SPBE, terdapat pula penelitian mengenai prinsip SPBE yang dilakukan oleh Silambi (2020) yang melakukan penelitian terkait efektivitas pengelolaan SPBE di Kabupaten Toraja Utara yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi naratif untuk membandingkannya data-data serta menelaah dokumen terkait efektivitas. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pada aspek efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, dan efisien berjalan belum efektif sedangkan aspek akuntabilitas dan interoperabilitas sudah cukup efektif dan aspek lainnya yaitu

aspek keamanan berjalan efektif. Hasil dari berbagai aspek tersebut juga didukung dengan alasan ketidak efektifan di Kabupaten Toraja Utara.

Terdapat pula penelitian lainnya yang juga meneliti terkait prinsip SPBE seperti yang dilakukan oleh Wamafna (2021) penelitian ini mengenai SPBE dalam meningkatkan pelayanan masyarakat pada Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manokwari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu, implementasi SPBE di Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari belum berjalan lancar berdasarkan prinsip aspek SPBE. Penelitian ini diperlukan penelitian lanjutan dikarena keterbatasan waktu serta durasi penelitian yang singkat hanya 2 minggu sehingga kurang maksimal. Setelah adanya penelitian mengenai implementasi dan keefektivitasan SPBE, maka terdapat penelitian mengenai evaluasi SPBE guna mengetahui perkembangan dari penerapan SPBE tersebut.

Penelitian terkait evaluasi tingkat kematangan SPBE dilakukan oleh Nabilah (2021) yang melakukan penelitian terkait evaluasi tingkat kematangan SPBE Pemerintah Kota Surabaya. Penelitiannya dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplor lebih dalam terhadap fokus penelitiannya tersebut. Penelitian ini menghitung tingkat kematangan SPBE Pemerintah Kota Surabaya menggunakan *e-government maturity model*. Hasil dari penelitian ini yaitu, perhitungan nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Surabaya senilai 3.90 yang termasuk kategori sangat baik. Saran yang didapat dalam penelitian ini yaitu aspek SPBE yang terdiri dari beberapa Indikator harus diteliti lebih lanjut secara spesifik dan melakukan perbandingan dengan menyelaraskan hasil evaluasi penilaian menggunakan PERMENPANRB.

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, berdasar kepada kajian-kajian terdahulu yang telah peneliti jabarkan di atas. Penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan pertama yaitu mengenai subjek penelitian, walaupun membahas terkait indeks SPBE namun subjek penelitian ini adalah Kementerian ATR/BPN. Perbedaan kedua yaitu

pembahasan peneliti akan berfokus pada strategi peningkatan nilai indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat dicapai kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka dapat disimpulkan terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan pada SPBE Tahun 2023 agar terjadi peningkatan indeks SPBE di Kementerian ATR/BPN diantaranya adalah memaksimalkan SDM, memperkuat dan melengkapi regulasi, menambah dana penganggaran, memaksimalkan sekuritas data, menyediakan sarana prasarana, melakukan koordinasi rutin dan berkala, membuat bank arsip, bersinergi antar tim internal dan antar eksternal, dan optimalisasi evaluasi mandiri;
- b. Faktor pendukung SPBE yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN meliputi perencanaan strategis SPBE, penganggaran dana, pengesahan draft juklak, penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, layanan administrasi pemerintahan yang terdigitalisasi dan kolom layanan publik yang dapat diakses secara online sedangkan faktor kelemahan SPBE yang perlu dikaji dan diperbaiki meliputi dokumentasi yang tidak lengkap, perubahan kebijakan secara tiba – tiba, kurangnya koordinasi pada *second party*, dan belum terdapatnya tahapan resmi terkait arsitektur kementerian;
- c. Dalam menanggulangi faktor penghambat dilakukan peningkatan perbaikan kajian arsip dokumentasi sehingga dokumentasi tersusun rapih dan lengkap, dilakukan koordinasi untuk menanggulangi kebijakan yang tiba – tiba dan koordinasi pada *second party* yang masih terkendala, perlu adanya regulasi tetap yang mengatur tahapan resmi arsitektur kementerian;
- d. Progres peningkatan indeks SPBE di lingkup Kementerian ATR/BPN yaitu dapat dilihat di indeks pada domain Manajemen SPBE yaitu

sebesar 2,73 di tahun 2022 dan menjadi 3,45 di tahun 2023 yang terdiri dari aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan bobot 2,88 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 3,45 di tahun 2023 serta Audit TIK dengan bobot 2,33 di tahun 2022 dan menjadi 3,00 di tahun 2023. Domain tertinggi diperoleh pada domain layanan SPBE dengan nilai bobot sebesar 4,01 di tahun 2022 dan meningkat di tahun 4,26 yang terdiri dari aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan bobot 3,90 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 4,10 di tahun 2023 dan layanan publik berbasis elektronik dengan bobot 4,17 di tahun 2022 meningkat menjadi 4,50 di tahun 2023;

- e. Dampak peningkatan nilai SPBE di Kementerian ATR/BPN yaitu dari segi pelayanan jasa ke masyarakat yang meningkat menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Masyarakat tidak perlu menunggu berbulan – bulan untuk mengurus dokumen pertanahan, selain itu pelayanan yang cepat akan meningkatkan volume transaksi sehingga meningkatkan jumlah PNBPN dan meningkatkan *economic growth* di Indonesia hal ini terbukti dari nilai pertumbuhan modal tetap bruto Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,02% dari yang sebelumnya sebesar 3,9% di tahun 2022 (Silfia, 2024) dan layanan hak tanggungan Elektronik Kementerian ATR/BPN sudah memberikan *economic value added* sebesar 3,05 T dan PNBPN dari layanan elektronik senilai 6,52 T hingga akhir tahun 2023 berdasarkan penilaian interview tim asesor 2023. Semakin meningkatnya volume transaksi maka Kementerian ATR/BPN memiliki peluang besar untuk terus berkembang dengan biaya akumulasi yang didapat melalui distribusi dari pemerintah, serta kemajuan transformasi digital bagi rakyat Indonesia.

## **B.Saran**

Saran pada penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kementerian ATR/BPN dapat melihat potensi peluang, ancaman, keunggulan serta kelemahan yang ada pada sistem SPBE di Kementerian

ATR/BPN sebagai aspek – aspek yang dapat ditingkatkan pada keunggulan dan peluangnya seperti perencanaan strategis SPBE Kementerian ATR/BPN, penganggaran dana penyelenggaraan SPBE Kementerian ATR/BPN, pengesahan draft Juklak SPBE Kementerian ATR/BPN, penyelenggaraan dan penerapan manajemen SPBE, peningkatan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta aspek yang harus direduksi atau dihilangkan dari segi kelemahan dan ancamannya seperti dokumentasi penyelenggaraann SPBE yang tidak maksimal, perubahan kebijakan yang mendadak, kurangnya koordinasi pada *second party*, belum terdapat tahapan resmi terkait arsitektur SPBE Kementerian ATR/BPN.

- b. Kementerian ATR/BPN dapat mempertimbangkan beberapa strategi yang diusulkan guna meningkatkan indeks SPBE sehingga memiliki nilai yang lebih maksimal seperti memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkompeten menyelenggarakan SPBE, memperkuat dan melengkapi regulasi SPBE, penambahan penganggaran dana terkait penyelenggaraan SPBE, memaksimalkan sekuritas data pertanahan, serta koordinasi rutin dan berkala antar tim koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian ATR/BPN maupun dengan pihak luar.
- c. Untuk calon peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai strategi peningkatan nilai indeks SPBE pada Kementerian ATR/BPN dapat menggunakan metode yang lain dengan menggunakan software Nvivo atau software lainnya untuk melihat prioritas data kualitatif dan penjabarannya agar semakin struktural. Peneliti juga dapat melakukan penelitian pada instansi – instansi lain seperti Kominfo, Disdukcapil dan lainnya dengan topik bahasan yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 26–49. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135>
- Anugrah, Z. E., Zakaria, S., & Darmawan, I. (2022). *EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS*. 2(April), 13–24.
- Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). *EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN E-GOVERNMENT MATURITY MODEL ( KASUS DI PEMERINTAH KOTA GORONTALO ) THE EVALUATION OF ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM USING E-GOVERNMENT MATURITY MODEL ( CASE IN GOVERNMENT OF GORONTALO CITY )*.
- Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(1), 47. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780>
- Choirunnisa, L., Hajar, T., Oktaviana, C., Ainur, A., & Rohmah, E. I. (2023). *PERAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK ( SPBE ) DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA UIN Sunan Ampel Surabaya*
- Khaidarmansyah, & Saifuddin, R. (2022). *OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PROVINSI LAMPUNG*. 16(1), 85–95.
- Nabilah, A., Studi, P., Informasi, S., Sains, F., Teknologi, D. A. N., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2021). *EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ( SPBE ) MENGGUNAKAN PERMENPAN NOMOR 59 TAHUN 2020*.
- Nurdiyah. (n.d.). *Transformasi Digital Dalam Sektor Digital Transformation in Agribusiness*. 305–338.
- Panjaitan, W. J., & Lupiana, F. (2023). Penerapan Tranformasi Digital dan Hambatannya Pada Industri Kuliner di Indonesia. *Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 278–301.
- Putera, R. L. (2021). *Peran spbe (sistem pemerintahan berbasis elektronik) dalam meningkatkan pelayanan perkara di pengadilan agama Mojokerto*.
- Putra, D. S., & Fauziati, S. (2022). *EVALUASI DOMAIN MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 59 TAHUN 2020 EVALUATION OF SPBE MANAGEMENT DOMAIN OF YOGYAKARTA CITY GOVERNMENT*

*BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF PAN-RB NUMBER 59 OF 2020.* 5(1), 54–61. <https://doi.org/10.33387/jiko>

- Rasyidah Hamid, D. H. (2022). Transformasi Digital Serta Integrasi Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Santri Taman Pendidikan Al-Qur'an Daarussalaam Bantul. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Di Sekolah Dasar Islam*, 4(5), 2556–2560.
- Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Irman, A. (2022). *Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik ( SPBE ) yang berkelanjutan di Provinsi Banten.* 7(1), 1–5.
- Rochmawati, D. R., Hatimatunnisani, H., Veranita, M., & Pajajaran, P. (2023). Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital. *COOPETITION: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(1), 101–108.
- Royyana, A. (2018). STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PADA PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK. *Journal of information system public health* 3(3). *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat Journal of Information Systems for Public Health*, 3(3), 15–32.
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Oleh : *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 95, 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Silambi, E., Studi, P., Terapan, M., Negara, A. P., Stia, P., & Makassar, L. A. N. (2020). *Efektivitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten toraja utara.*
- Silfia, A. (2024, Februari 7). Indonesia Memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2% di Tahun 2024. Diambil kembali dari Antara: <https://en.antaranews.com/news/305433/indonesia-projects-52-percent-economic-growth-in-2024>
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., Purwaningsih, M., Indonesia, U., Selatan, J., & Korespondensi, P. (2023). *ANALISIS FAKTOR TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK FACTOR ANALYSIS ON DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC SERVICE IN.* 10(4), 883–892. <https://doi.org/10.25126/jtiik2023107059>
- Sugiyono. (2018a). Educational Research Methods Quantitative, Qualitative, and R&D Approaches. *Alfa Beta*, 114, 6–46.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Wamafna, Y. (2021). *SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK*

*(SPBE) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS PERSANDIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANOKWARI.*

- Yanti, O. (2022). Transformasi pelayanan publik digital di masa pandemi covid-19 untuk mewujudkan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 2085–1960.
- Yanuar Kirana, A., Saifudin, M., Miftachul Mukhlisin, M., Fatmawati, N., Isa Ansori, M., Raya Telang, J., Box, P., Kamal, K., & Jawa Timur, B. (2023). Transformasi Digital terhadap Sumber Daya Manusia sebagai Upaya Meningkatkan Kapabilitas Perusahaan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(4), 19–36.
- Yunarti, S., Wijayanti, W., & Harmaningsih, D. (2022). Model Blended Learning & Hybrid Learning Untuk Keberhasilan Transformasi Digital Menuju Smart Society. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 76–86. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i3.2186>